



AKSI STRANAS PK:
UTILISASI NIK DAN OPTIMALISASI INTEROPERABILITAS DATA
UNTUK AKURASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

5 SEPTEMBER 2023



Kementerian
Dalam Negeri



panrb

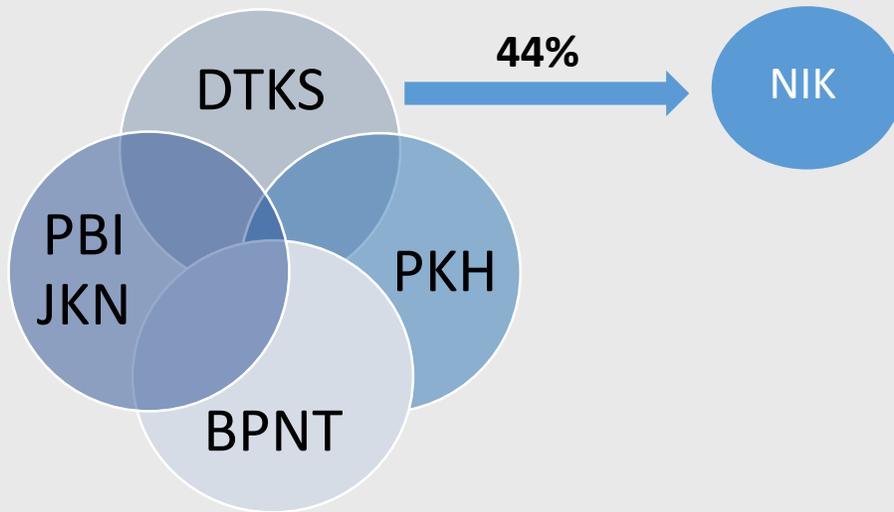


Kementerian PPN/
Bappenas



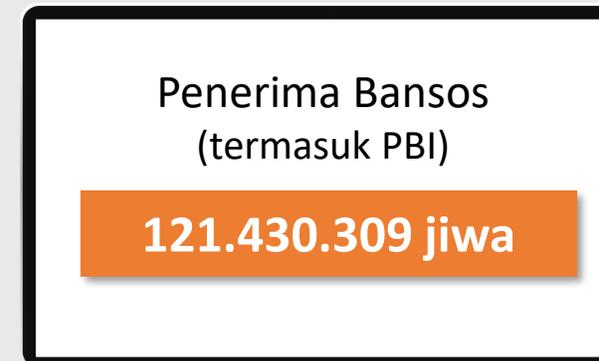
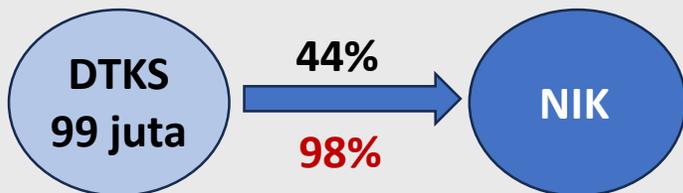
KANTOR STAF PRESIDEN

SEBELUM STRANAS (2019)



-  Hanya 44% DTKS yang sudah divalidasi dengan NIK
-  Terdapat 9% data dengan NIK Kosong dan 2% NIK tidak valid (tidak sesuai format)
-  Pengelolaan data di Kemensos tidak terintegrasi (terpisah di 3 Direktorat berbeda)
-  Teridentifikasi penerima bansos ganda bahkan penerima bansos Non DTKS

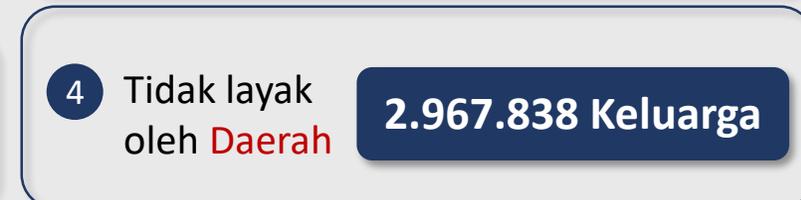
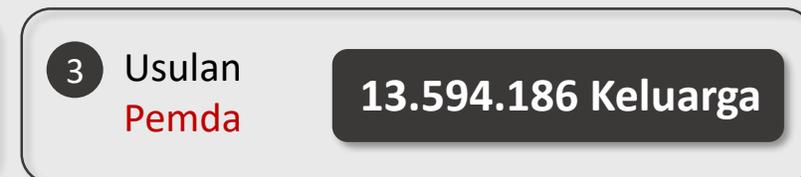
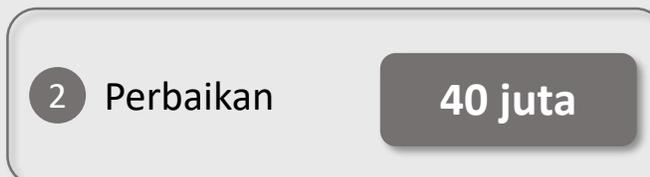
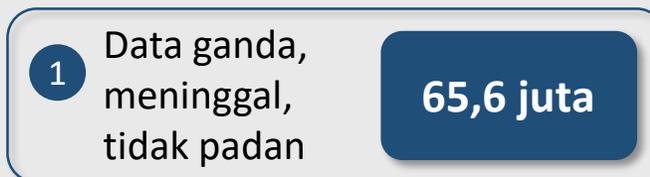
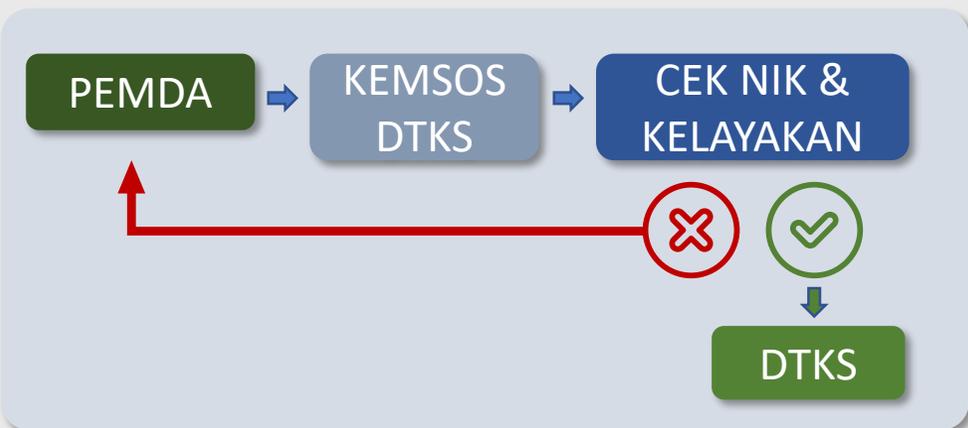
Kondisi DTKS per Juli 2023



Reformasi Tata Kelola Data di Kemensos

1. Penetapan SK DTKS dari 6 bulan 1 kali menjadi 1 bulan 1 kali
2. Mekanisme usul sanggah → Cekbansos.kemsos.go.id

Sejak 2021, data yang diperbaiki adalah :



1



Jumlah keuangan negara yang dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran antara lain:

- Penonaktifan 15,3 juta data dari 41,5 juta jiwa PBI JKN tahun 2019-2020 = **375 M/bulan**
- Penggunaan DTKS, BPUM dan Prakerja sebagai penapis untuk calon penerima subsidi Upah 2021/2022 = **2,5 T**
- Perbaikan DTKS dan data penerima bantuan sosial = **523 M/bulan**

2

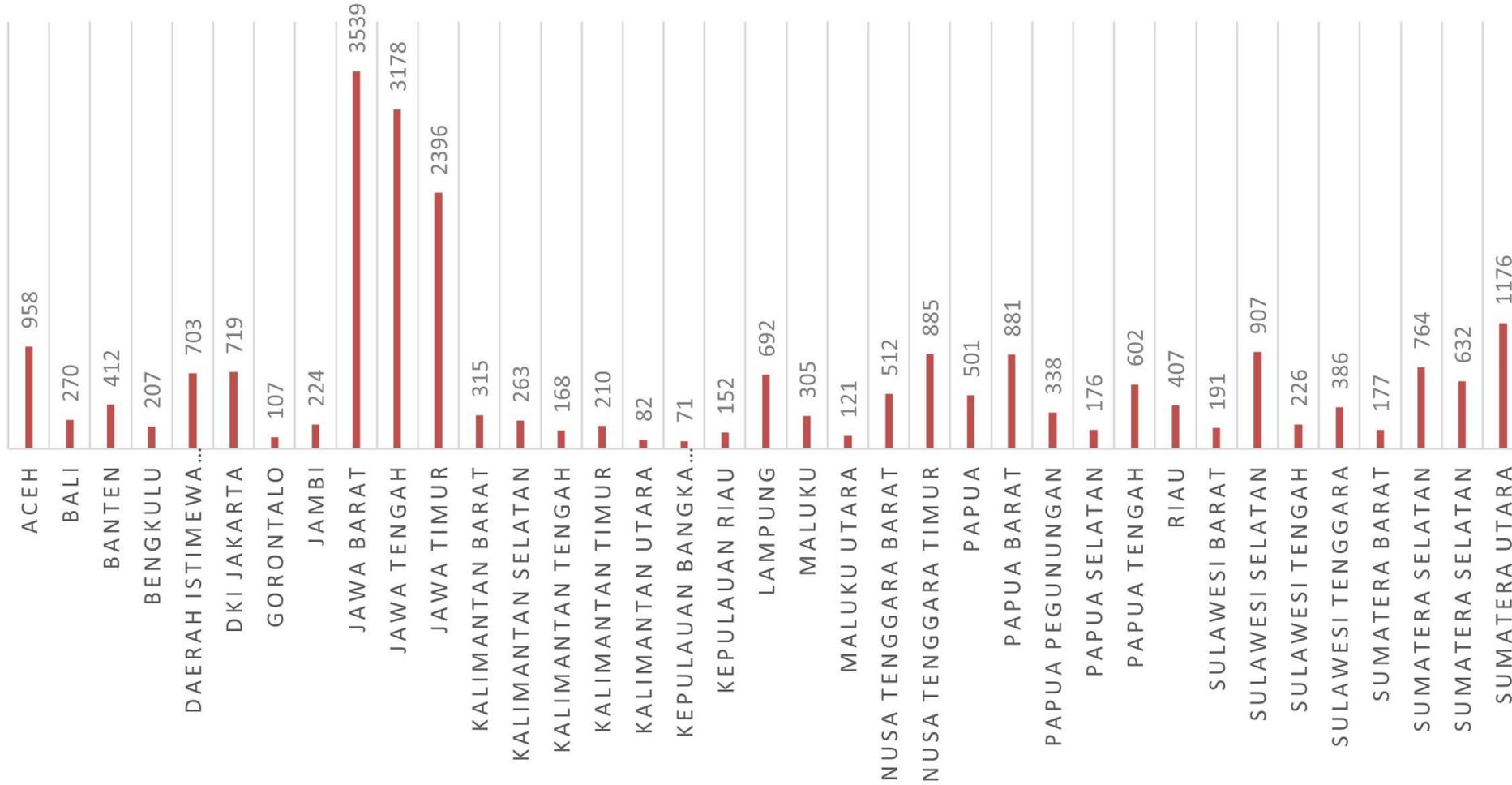


Identifikasi penerima bantuan sosial tidak layak karena:

- Memiliki pekerjaan sebagai ASN **(23,8 rb)**
- Memiliki kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai penerima upah minimum Kabupaten **(493 rb)**
- Terdaftar sebagai pengurus/pemilik Badan Hukum **(14 rb)**

PENERIMA BANSOS TERINDIKASI ASN

Total = 23,8 rb

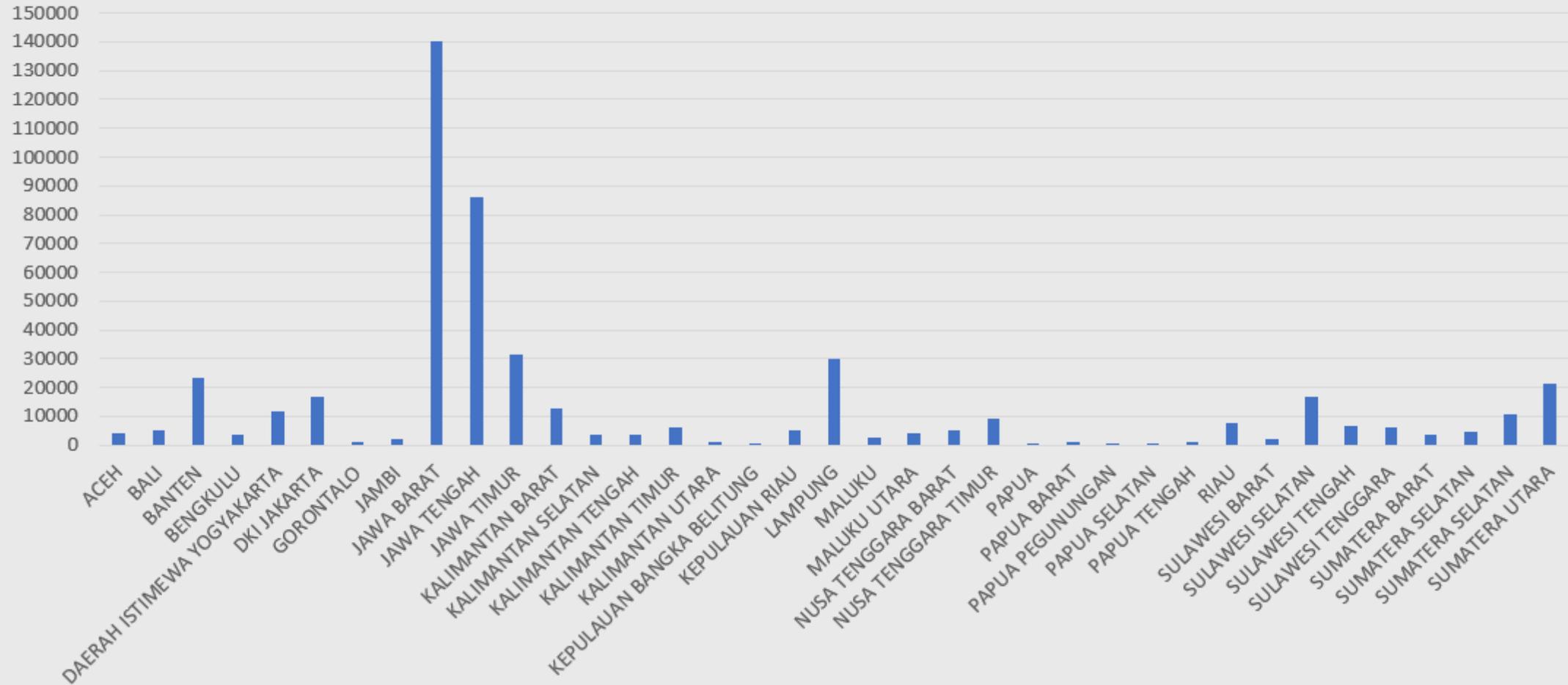


Potensi kerugian negara dari pemadanan kelanjutan BKN, BPJSTK, AHU **140,9 M**



JUMLAH PENERIMA BANSOS DI ATAS UMK

Total = 493 rb





STRANAS PK

**SEKRETARIAT NASIONAL
PENCEGAHAN KORUPSI
(SETNAS PK)**



Gedung KPK
Jl. HR Rasuna Said Kav. C1
Setiabudi, Jakarta Selatan



021-25578300 ext. 8014



stranaspk.id



@stranaspk_official



StranasPK Official



@stranas_pk



Stranas PK



Kementerian
Dalam Negeri



panrb
PUSAT ANALISIS DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN



KANTOR STAF PRESIDEN